SKRIPSI

ANALISIS APBD KOTA YOGYAKARTA DI ERA OTONOMI DAERAH TAHUN 2012-2015

(Penelitian Deskriftif Kualitatif di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta)

Disusun Oleh:

DOROTEA

13520055

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu *Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat* Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari	: Jumat
Tanggal	: 31 Maret 2017
Jam	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang M. Soetopo STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si **Ketua/ Penguji/ Pembimbing**	
Dra. Hari Saptaning Tyas, M.Si Penguji Samping I	
Dra. Herawati, MPA Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2017

MOTTO

1. ***Kesalahan akan membuat mu belajar menjadi benar. Setelah benar berniatlah untuk tidak mengulanginya kembali. (Penulis)***
2. ***Hal yang awalnya berat untuk dilakukan namun jika kita terbiasa maka semuanya menjadi ringan. (Penulis)***
3. ***Mengasihi harus menjadi hal yang sedemikian biasa bagi kitasebagaimana hidup dan bernafas, hari demi hari sampai ajal menjelang (Mother Teresa)***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas karunia Tuhan Yesus dan Bunda Maria, karena atas berkat dan bimbingan-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan kayaku ini dan ini kupersembahkan untuk semua orang yang berarti dalam hidupku:

1. Untuk “AYAHKU (APAK)” Paulus Jajan, yang selalu berjuang dan tak kenal lelah dalam memotivasi dan memberikan dukungan disaat aku mengalami kesulitan, selalu berusaha maksimal untuk membiayai proses perkuliahanku ditengah kesulitan yang sedang dihadapi, dan selalu berusaha mengedepankan keperluan pendidikan ku padahal Apak masih dalam tahap pemulihan. Cepat sembuh seperti semula apak karyaku ini kupersembahkan untukmu walaupun ini takkan mampu membayar tetes keringat yang engkau perjuangkan untukku.
2. Untuk “MAMAKKU” Muk Lian, yang juga sesalu berusaha memberikan dukungan dan doa serta harapan. Terimakasih atas semua dukungan yang mamak berikan, Karyaku ini kupersembahkan untuk mu Mak sebagai bukti bahwa aku selalu kuat dan selalu berjuang berkat doa mamak, aku sadar ini tak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang telah engkau berikan padaku, tapi ini bukanlah akhir tapi ini adalah awal perjuangan untuk hari-hari esok.
3. Untuk Kakak Tilit, Bang Barus, Bang Yakop, Kak Liya dan Adikku Ongga karya ini Rote persembahkan untuk kalian, terima kasih telah memberikan doa dan

dorongan kepada Rote agar selalu semangat menjalankan kuliah. Terimakasih juga atas segala bantuan baik motivasi, nasehat dan materi yang diberikan. Semoga karya ini dapat membayar semua bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan meskipun Rote tau karya ini tidak begitu sempurna untuk membalas semua dukungan dari kalian.

4. Untuk Pujaan Hatiku, Alpianus Adel, karyaku ini kupersembahkan untukmu, terimakasih atas segala bentuk dukungan dan doa serta motivasi nasehat yang selalu kau berikan padaku sehingga karyaku ini bisa terselesaikan.
5. Untuk Almamaterku STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Untuk Dosen pembimbingku, Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. Terimakasih telah bersabar membimbing dan mengajariku dengan segala keterbatasan dan kelemahan, tanpa Ibu saya tidak mungkin bisa menyelesaikan karya ini tepat waktu dan segera pulang untuk menemui dan membantu kedua Orangtuaku.
7. Untuk teman-teman Kost Hibrida Satu, Mega, Riska, Risma, Fitri, Raudha, Winda. Karya ini aku persembahkan untuk kalian terimakasih atas doa dukungan, motivasi dan bantuan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Terutama untuk Megawati Sutriana Gratia Tarek, terimakasih untuk doa dukungan motivasi dan bantuan yang sering Ngana kasi pa kita.
8. Untuk teman-teman Hibrida Dua (Sela, Bonita, Yani, Vio dll) dan Para Skuat Soe yang tidak perlu disebut namanya. Karya ini aku persembahkan untuk kalian.

Terimakasih teman-teman atas semua dukungan motivasi dan doa yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Terimakasih juga atas hari-hari yang menyenangkan yang kita lalui bersama.

9. Untuk kakak ku ketemu gede, Rodearni Girsang dan Eva Anzaya karya ini aku persembahkan untuk kalian. Terimakasih pula atas dukungan motivasi dan doa yang diberikan dari jarak jauh sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Harapannya kedepan kita dapat berjumpa kembali.
10. Untuk semua Kerabat, Teman dam keluarga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua bantuan, motivasi dan dukungan serta doa yang kalian berikan, lewat karya sederhana ini, saya persembahkan untuk kalian semua, akhir kata saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga Tuhan selalu meryertai setiap langkah kita. Amin.

Kata Pengantar

Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas Rahmat dan Bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. Judul yang diangkat oleh penulis adalah "Analisis APBD Kota Yogyakarta Di Era Otonomi Daerah Tahun 2012-2015".

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Shadan, S.IP., M.A. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
3. Ibu, Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA., Selaku Dosen Wali yang selalu memotivasi dan member dorongan dalam pembuatan skripsi

5. Ibu Dra. Hari Saptaning Tyas, M.Si ., selaku dosen penguji samping I yang telah menguji, memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam ujian Skripsi.
6. Ibu Dra. Herawati, M.PA., selaku dosem penguji samping II yang telah menguji, memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam ujian Skripsi.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang telah mengijinkan penulis dalam melakukan penelitian.
8. Semua Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan civitas akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Yogyakarta, April 2017

Penulis,

Dorotea

Daftar Isi

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Motto iii

Halaman Persembahan iv

Kata Pengantar vii

Daftar Isi viii

Sinopsis xi

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Kerangka Teori dan Alat Analisis 10
D.1. Anggaran Sektor Publik 10
D.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 18
D.3. Efektivitas dan Efisiensi APBD 26
D.4. Alat Analisis 31
E. Ruang Lingkup 35
F. Metode Penelitian 35
F.1. Jenis Penelitian 35
F.2. Unit Analisis 36
F.3. Teknik Pengumpulan Data 36
F.4. Teknik Analisis Data 37

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39

A. Gambaran Kondisi Umum Daerah 39
B. Aspek Geografi 39
C. Luas Wilayah 41
D. Aspek Demografi 43
E. Pendidikan 45
F. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Yogyakarta 48
F.1. Kedudukan dan Tugas Pokok 48
f.2. Sumber Daya Manusia 48
F.3. Sarana dan Prasarana Pendukung 49
F.4. Pelayanan 50
F.5. Struktur Organisasi 50
F.6. Data Laporan Realisasi APBD Kota Yogyakarta 52
Tahun 2012-20145

Bab III Analisis da Pembahasan 69

A. Deskripsi Informan 69
B. Analisis Efektivitas Pendapatan Daerah 70
C. C.1. Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 75
C.2. Analisis Efektivitas PAD Persumber Pendapatan 77

C.3. Analisis Dana Perimbangan Persumber Pendapatan 114

C.4.Analisi Efektivitas Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 125

Persumber Pendapatan

C.5. Analisis Derajat Desentralisasi 130

D. Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 131
E. Analisis efektivitas Belanja Daerah 137
F. Analisis Pembiayaan 148

Bab IV Penutup 153

A. Kesimpulan 153
B. Saran 157

Daftar Pustaka

SINOPSIS

Semangat otonomi daerah saat ini memacu Pemerintah Daerah untuk mencapai kemandirian dan tercapainya target kinerja secara maksimal. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan daerah dalam melaksanankan pemerintahan yang baik maka daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengembangkan potensi yang ada di daerah dengan seluas-luasnya dan seefisien mungkin berdasar undang-undang. Hal ini yang di sebut dengan otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi, daerah tentunya membutuhkan pendanaan dan keuangan yang baik untuk mengembangkan daerah. Pendanaan dan keuangan ini yang dinamakan APBD, dimana daerah memiliki sumber keuangan yang jelas dengan perencanaan yang jelas dan matang agar APBD dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kota Yogyakarta merupakan Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga dituntut untuk mampu melaksanakan dan menjalankan APBD secara efektif dan efisien. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikatakan tinggi setiap tahunnya. Namun, bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah ini agar keuangan dan anggaran yang ada di Kota Yogyakarta dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta untuk mencapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta tentunya Pemerintah Kota Yogyakarta harus menggunakan anggaran atau APBD secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja APBD Kota Yogyakarta di masa kepemimpinan Bapak Haryadi Suyuti pada periode 2012-2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek yang diteliti adalah analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2015 Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Adapun objek yang akan diteliti adalah Kepala BPKAD dan anggota lainnya yang berkaitan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan metode triangulasi dimana pertama menganalisis data sekunder terlebih dahulu kemudian melakukan wawancara terkait dengan hasil analisis kepada pihak yang berkompeten.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulakan bahwa kinerja anggaran Kota Yogyakarta berdasarkan rasio efektivitas dilihat dari sisi efektivitas pendapatan dan efektivitas belanja. Dari sisi efektivitas pendapatan menunujukan bahwa rata-rata setiap tahunnya dari tahun 2012-2015 nilai efektivitas berada pada kategori sangat efektif. Kemudian dari sisi belanja menunjukan bahwa rata-rata dari tahun 2012-2015 efektivitas belanja berada pada kategori kurang efektif. Kinerja anggaran Kota Yogyakarta berdasarkan rasio efisiensi yang dilihat dari sisi efissiensi pendapatan menunjukan bahwa rata-rata setiap tahun dari tahun 2012-2015 menunjukan angka yang sangat efisien. Kemudian, di era otonomi saat ini Kota Yogyakarta dalam masa Pemerintahan Bapak Haryadi Suyuti mengalami peningkatan derajat desentralisasi tiap tahunnya, yang berarti Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dapat menjalankan otonomi daerah dengan baik.

Kata kunci : *analisis, Efektivitas, Efisiensi, APBD*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masa reformasi babak baru telah dimulai bagi bangsa Indonesia. Pada masa ini otonomi menjadi tuntutan setiap daerah. Dengan adanya otonomi, daerah dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuan dan kemandirian daerah secara optimal. Daerah harus mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Saat ini Negara kita sedang gencar-gencarnya melakukan reformasi birokrasi agar kinerja pemerintah semakin membaik. Dalam hal ini pemerintah pusat menekankan agar daerah mampu sinergis dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dan efisien. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan daerah dalam melaksananankan pemerintahan yang baik maka daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengembangkan potensi yang ada di daerah dengan seluas-luasnya dan seefisien mungkin berdasar undang-undang. Hal ini yang di sebut dengan otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi, daerah tentunya membutuhkan pendanaan dan keuangan yang baik untuk mengembangkan daerah. Pendanaan dan keuangan ini yang dinamakan APBD, dimana daerah memiliki sumber keuangan yang jelas dengan perencanaan yang jelas dan matang agar APBD dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Melihat sejarah tumbuh kembangnya keuangan daerah dapat kita lihat bahwa tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai 1 januari 2001.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2009; 2). Daerah saat ini dapat dikatakan memiliki kedudukan yang nyaman dibandingkan di masa orde baru. Saat ini daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan potensi dan kekayaan yang ada di daerah agar terciptanya kemandirian di daerah tanpa ada ketimpangan dengan daerah lain. Daerah juga dituntut untuk mampu menjalankan otonomi seefektif dan seefisien mungkin agar program pembangunan dan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menilik lebih jauh lagi bagaimana historis perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga tahap perkembangan. Pertama, era pra-otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai dari tahun 1974-1999, dimana pelaksanaan otonomi di masa Orde Baru berdasar UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang bersifat sentralistik, *top down planning* dan *budgeting*, penggunaan anggaran tradisisional, rezim anggaran berimbang (*balance budget*), sistem pembukuan tunggal (*single entry*) dan akuntansi basis kas (*cash basis*). Dimasa pra-otonomi pengelolaan keuangan daerah yang baik belum terlaksana. Pengeloaan keuangan daerah mendasar pada buku Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) tahun 1981 yang pada esensinya belum merupakan sistem akutansi, tetapi sekedar penatausahaan keuangan atau tata buku. Kedua, era transisi otonomi mulai tahun 2000-2003.

Reformasi manajemen keuangan daerah mulai dilaksanakan setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang bersifat desentralisasi, *bottom up (participative) planning and budgeting*, penggunaan anggran berbasis kinerja, sistem pembukuan berpasangan (*double entry bookkeeping*), dan akuntansi basis kas modifikasian *(modified cash basis*). Kemudian pemerintah mengeluarkan PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP No. 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian dikeluarklan pula petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana PP No. 105 Tahun 2000, dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 untuk secara bertahap mengganti model tata buku sebagaimana dalam Manual Keuangan Daerah menjadi sistem akuntansi. Dengan dikeluarkannya Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 inilah yang menandai era transisi otonomi menuju sistem yang lebih ideal. Ketiga, era pasca transisi adalah masa dimana peraturan perundangan yang merupakan suatu perencanaan yang menyeluruh dan komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengauditan dan evaluasi kinerja atas pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan sistem anggaran dari sistem anggaran yang tradisional ke sistem anggaran yang berbasis kinerja menghimbau pemerintah daerah dapat mempergunakan anggaran dengan baik dan efisien. Sistem anggaran berbasis kinerja sangat menekankan pada keberhasilan anggaran berdasarkan *indicator input*, *output*, dan *outcome* dari anggran tersebut. Jika pada sistem anggaran tradisional lebih bersifat sentralistik dan *top down*, maka dalam anggaran berbasis kinerja lebih ditekankan pada sistem anggaran yang partisipatif/ *buttom up*. Sesuai

dengan yang dikatakan Heinrich (2002:714) bahwa dalam hal ini diperlukan sistem menejemen berbasis *outcome* agar kinerja manajer publik atau aparat pemerintah lebih efektif daripada dengan pendekatan tradisional pada pengendalian birokrasi. Oleh karena itu pendekatan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan kualitas dari setiap pemerintah daerah supaya penggunaan anggaran dapat lebih efisien. Selain itu pemerintah mampu menggunakan anggaran sebaik dan seadil mungkin agar masyarakat dapat merasakan sisi positif dari penggunaan anggaran, karena pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pengalokasian dan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien dapat memicu keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menjalankan otonomi daerah. (Mardiasmo, 2002:117)

Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang baru yaitu UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga semakin memperkuat pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dan mengembangkan potensi di daerah agar lebih maju lagi. Dalam Undang-undang ini juga daerah harus mampu melaksanakan dan mengelola anggaran lebih efektif, efisien dan ekonomis. Menurut Mardiasmo (2002:231), keberhasilan otonomi daerah tersebut dapat dicapai apabila lembaga *sector public* dikelola dengan memerhatikan konsep *Value For Money. Value For money* merupakan ekspresi dari pelaksanaan *sector public* pada tiga elemen dasar yaitu ekonomi, efisien dan efektif. Oleh karena itu pemerintah menekankan agar anggaran lebih menggunakan sistem pendekan berbasis kinerja agar keberhasilan anggaran tidak hanya dilihat dari *input*-nya saja, namun bagaimana anggaran dapat lebih efisien dipergunakan

untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diinginkan. Selain itu pula kinerja aparat pemerintah juga sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya efisiensi anggaran daerah agar tidak terjadi pemborosan dan penghamburan anggaran.

Kota Yogyakarta merupakan Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga dituntut untuk mampu melaksanakan dan menjalankan APBD secara efektif dan efisien. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikatakan tinggi setiap tahunnya. Namun, bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah ini agar keuangan dan anggaran yang ada di Kota Yogyakarta dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta untuk mencapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyakat yang ada di Kota Yogyakarta tentunya Pemerintah Kota Yogyakarta harus menggunakan anggaran atau APBD secara efektif dan efisien.

Berbicara mengenai Kota Yogyakarta, tidak akan lepas dari kepala Pemerintahannya yaitu Haryadi Suyuti yang menjabat menjadi Wali Kota Yogyakarta pada periode 2011-2016. Kota Yogyakarta yang dijuluki sebagai Kota Pelajar karena kualitas pendidikan yang memadai menjadikan daerah ini sebagai salah satu daerah yang mobilitasnya termasuk tinggi. Pada masa pemerintahan Haryadi Suyuti, Kota Yogyakarta sering mendapatkan penghargaan bergengsi tingkat nasional, salah satunya adalah Kota Yogya merupakan salah satu dari 10 Kota yang mendapat penghargaan dengan kinerja terbaik penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2013 yang di serahkan pada peringatan hari OTDA tahun 2015.

(*http://jogja.tribunnews.com/2015/04/28/pemkot-yogya-masuk-10-besar-kinerja-pemerintahan-terbaik-nasional*)

Selain mendapatkan penghargaan sebagai kota dengan kinerja Pemerintah terbaik, Kota Yogyakarta di tahun 2015 juga mendapatkan penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Wistara. Penghargaan ini merupakan Penghargaan tertinggi kota sehat yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini diterima oleh Kota Yogyakarta untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut. Melengkapi penghargaan tersebut, Yogyakarta juga berhasil meraih dua penghargaan lainnya, yakni Ksatria Bakti Husada Kartika yang diterima oleh Walikota Yogyakarta, H. Haryadi Suyuti atas prestasinya dalam mendorong pembangunan Kesehatan, serta penghargaan Institusi Kesehatan Berprestasi terbaik kategori Perkotaan yang diraih oleh Puskesmas Mantrijeron. Ketiga penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof.Dr dr. Nila Djwuwita F Moeloek SpM (K) kepada Walikota Yogyakarta pada acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51. (*http://www.jogjakota.go.id/news/Yogyakarta-Kembali-Raih-Penghargaan-Kota-Sehat-Swasti-Saba-Wistara#sthash.IeYPvkDB.dpuf*)

Selain mendapatkan berbagai penghargaan, Kota Yogyakarta juga mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini dilakukan untuk merealisasikan visi Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan. Visi ini merupakan visi pembangunan Kota Yogyakarta dari tahun 2005-2025. Untuk mewujudkan visi pembangunan itu, Pemerintah Kota

Yogyakarta menempuh melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan. Kesembilan misi itu terdiri :

1) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan;
2) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata , Kota Budaya dan Kota Perjuangan;
3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa;
4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan.
5) Kelima adalah Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya;
6) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintah yang baik). Clean goverment (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokrasi dan berlandas hukum;
7) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai;
8) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas; dan
9) Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat. Dengan demikian Pemerintah Kota Yogyakarrta ingin menjadi Kota Yogyakarta sebagai Kota atau daerah percontohan dengan kualitas pelayanan yang terbaik dan dengan kinerja Pemerintah yang terbaik.

(*http://www.lod-diy.or.id/index.php/publikasi/kliping/kliping-2009/83-pelayanan-masyarakat-yang-terbaik*)

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan yang telah direncanakan, tentunya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta membutuhkan anggaran sebagai instrumen untuk melancarkan dan tercapainya tujuan pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dengan kata lain setiap perencanaan dalam melakukan suatu kegiatan baik dalam pembangunan, pelayanan dan administrasi akan membutuhkan anggaran untuk mempercepat tercapainya suatu tujuan. Pengelolaan anggaran yang baik akan membawa keberhasilan suatu pembangunan. Demikian juga dengan penggunaan anggaran dapat dikatakan bekerja dengan efektif dan efisien.

Melihat situasi di atas Kota Yogyakarta menghadapi permasalahan mengenai seberapa besar tingkat efektivitas dan efisisensi APBD Kota Yogyakarta dan apakah ada peningkatan efektivitas dan efisiensi pada tiap-tiap tahun anggaran. Peneliti ingin membuktikan apakah ada peningkatan tingkat efektivitas dan efisiensi atau penurunan pada APBD Kota Yogyakarta pada tiap tahunnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa alat analisis yang berkaitan dengan pencapaian efektivitas dan efsiensi pelaksanaan APBD untuk melihat Kinerja Anggaran Kota Yogyakarta di Era Otonomi Daerah 2012-2015. Penelitian ini dilakukan untuk melihat Kinerja Kota Yogyakarta dalam menjalankan otonomi daerah pada masa pemerintahan Haryadi Suyuti atau dapat dikatakan bahwa penelitian ini dilakukan untuk melihat keberhasilan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan otonomi daerah yang ditinjau dari pelaksanaan APBD secara efektif dan efisien selama satu periode pemerintahan Haryadi Suyuti. Namun, penelitian ini hanya dapat meneliti pelaksanaan APBD selama 4 tahun yaitu dari tahun 2012-2015, karena belum keluarnya laporan realisasi anggaran untuk tahun 2016 atau LPJ (laporan Pertanggungjawaban) tahun 2016. Dengan mengetahui hasil efektivitas dan efisiensi APBD maka akan diketahui pula kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan Otonomi Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik membuat sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Analisis APBD Kota Yogyakarta di Era Otonomi Daerah Tahun 2012-2015.”

DAFTAR PUSTAKA

Darise, Nurlan. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: PT. Indeks

Darise, Nurlan. 2009, Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: Indeks

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1984, Depdikbud, Balain Pustaka, Jakarta

Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: YKPN

Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta. Penerbit Erlangga

_____,2010. Analisis laporan Keungan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mardiasmo. 2002, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi

_____,2004. Efisiensi dan Efektivitas. Jakarta: Andi

_____,2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi

Martoyo, Susilo.2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat.BPFE, Yogyakarta

Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kuliatatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Widodo, S.T., 1990. Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Kanisius

Skripsi dan Tesis:

Hafsah, Siti. 2014, Skripsi Pengelolaan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012.

Winarti, Safitri Endah. 2015, Modul Mata Kuliah Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Halaman Web:

http://jogja.tribunnews.com/2015/04/28/pemkot-yogya-masuk-10-besar-kinerja-pemerintahan-terbaik-nasional

http://www.jogjakota.go.id/news/Yogyakarta-Kembali-Raih-Penghargaan-Kota-Sehat-Swasti-Saba-Wistara#sthash.IeYPvkDB.dpuf

http://www.lod-diy.or.id/index.php/publikasi/kliping/kliping-2009/83-pelayanan-masyarakat-yang-terbaik

http://www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor-mempengaruhi-kinerja.html?m=1